LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/ kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 1 Maret 2023
Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Kartanegra,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. H. Bambang Arwanto, AP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740111 199311 1 003

BerAKHLAK

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tupoksi	10
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	23
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	98
4.2 Perbaikan Kedepan	23
LAMPIRAN	

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

- **Tugas Pokok**

  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan program prioritas antara lain sebagai berikut :

  a. Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  b. Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
  c. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  d. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
  e. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

- **Permasalahan**

Daya Tarik investasi suatu daerah akan tinggi salah satunya jika terdapat kemudahan dalam pelayanan perizinan, dengan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan melayani maka akan terjadi percepatan Penanaman Modal pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dibutuhkan aparatur yang professional, standar prosedur yang jelas dan biaya pelayanan yang pasti. Menjawab tantangan untuk mencapai pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan kepastian biaya, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Dalam hal ini perlu adanya pembenahan kualitas dan motivasi aparatur pelaksanaan pelayanan tersebut.

Sebagai identifikasi awal terdapat beberapa permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta factor-factor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara.

2. Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan.

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara	Belum Optimalnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Belum adanya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. - Belum tersedianya Data dan Peta Potensi Investasi Menuju Sektor Hilir
		Kurang Optimalnya Promosi Penanaman Modal	Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengendalian Penanaman Modal	Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Penggunaan Sistem Informasi dalam Penanaman Modal	Belum Optimalnya Pengolahan, Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan	Belum efektifnya Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Belum Efektifnya Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan

Isu- isu Strategis

Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi bersama. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu- isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal;
3. Peningkatan konsistensi pelayanan penanaman modal;
4. Penyajian data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi secara elektronik;
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bersama seluruh unsur pendukung pemerintahan lainnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara akan siap memberikan pelayanan prima. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasinya pada kegiatan setiap tahun diharapkan akan *tercipta iklim investasi* yang lebih menarik dan kondusif, terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat daya saing dengan daerah lain dan daya tarik tersendiri bagi investor sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi pokok:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. Penyusunan laporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

a. Kepala
b. Sekretaris, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Tatalaksana;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Kepegawaian dijabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan dijabat oleh Perencana Ahli Muda.
c. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Madya, membawahkan:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda.
d. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya, membawahkan:

1. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pelayanan Elektronik Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda.

e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

f. Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

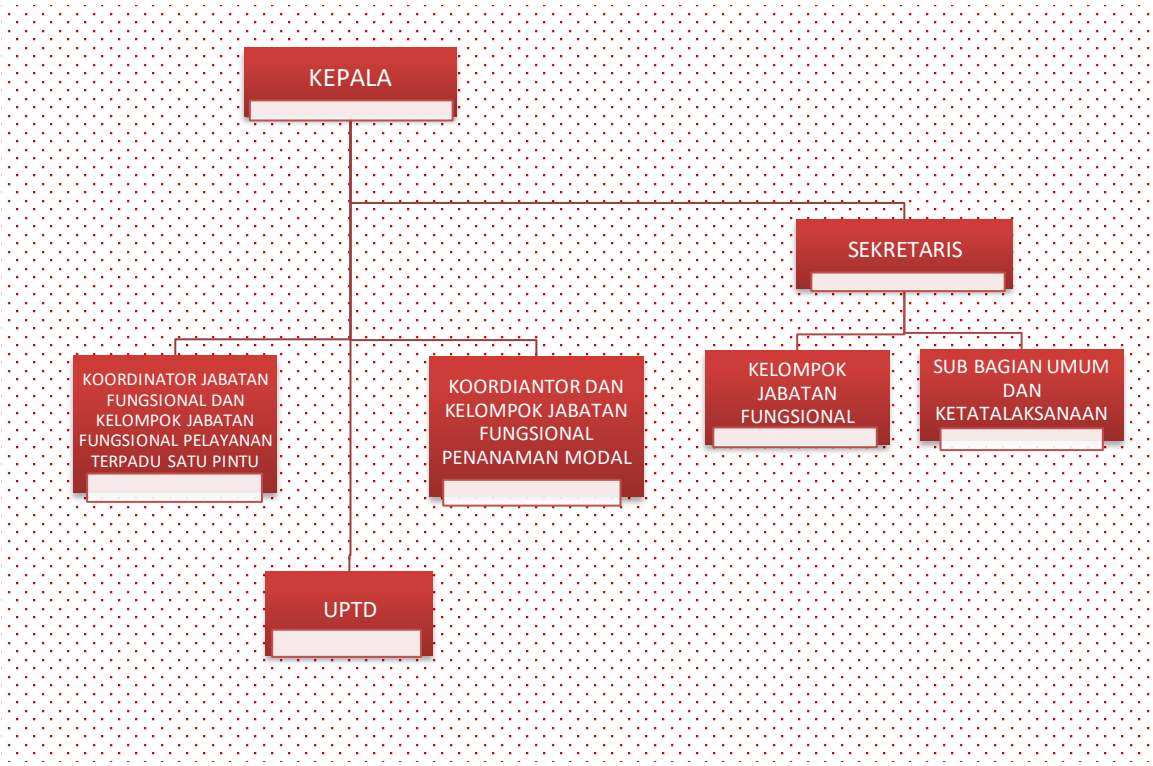

(Sumber Data: Lampiran Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021, Taggal 30 Desember 2021)

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

"(MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA)"

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke- 1 (Satu) yaitu **"*Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani*"** dan misi ke tiga **"*Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*"**, dengan program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) dan Program Kukar Bebaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 1.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA"					
NO.	**Misi yang Relevan**	**Tujuan**		**Sasaran**	
		Uraian	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Indikator Kinerja**
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman moda	Indek Kepuasan Masyarakat (%)
2	Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Investasi daerah melalui efisiensi pelayanan investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN) Triliun Rupiah

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Reformulasi desain investasi menuju hilirsasi SDA;
2. Digitalisasi dan Penggunaan AI (*artificial intelegent*) pelayanan perizinan**.**

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Reformulasi desain investasi menuju hilirsasi SDA	✚ Pemberian insentif pada investasi yang mentransformasikan sector hulu menuju sector hilir; ✚ Pengendalian investasi penanaman modal menuju hilirisasi SDA.
2	Digitalisasi dan Penggunaan AI (*artificial intelegent*) pelayanan perizinan	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Jumlah Proyek (PMDN/ PMA)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Program Promosi Penanaman Modal
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penerbitan Izin	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Penaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Jumlah Aplikasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Invetasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	3,88	Hasil Evaluasi SAKIP
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masrakat	Persen	87,12	Hasil Survey IKM dikalikan dengan 100 (Seratus)
3	Meningkatnya Tansparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	Jumlah lama hari tiindaklanjut hasil temuan / paling lambat 60 hari kerja dikalikan dengan 100 (Seratus)
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	Jumlah asset yang teridentifikasi dibagi jumlah asset dalam penulusuran dikalikan dengan 100 (Seratus)
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umu Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan	Persen	100	Jumlah paket pengadaan yang terinput dalam SIRUP dibagi dengan jumlah seluruh paket pengadaan yang harus diinput dikalikan dengan 100 (Seratus)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
		Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)			
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN per 31 Maret 2021 dibagi dengan Jumlah seluruh ASN yang wajib melaporkan LHKPN per 31 Maret 2021 dkalikan dengan 100 (Seratus)
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN per 31 Maret 2021 dibagi dengan Jumlah seluruh ASN yang wajib melaporkan LHKASN per 31 Maret 2021 dkalikan dengan 100 (Seratus)
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Hasil Evaluasi / Audit Kearsipan dari Tim Audit
4	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kerisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	Jumlah Data yang tersedia/ terisi pada aplikasi Satu Data Kukar dikalikan dengan 100 (Seratus)
5	Membuat inovasi dan/ atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	Jumlah Inovasi dalam Bidang Penaggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi OPD
6	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	1.766.000.000	Jumlah Pendapatan yang diterima selama 1 Tahun
7	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	Jumlah Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada LPPD dikalikan dengan 100 (Seratus)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
8	Terrealisasinya Output Kegiatan tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	Jumlah Capaian Output Kegiatan dikalikan dengan 100 (Seratus)

Tabel 5.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2026
1	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	82	85	89
2	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	3,88	7,00	9,78
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,12	87,12	91,73

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

BerAKHLAK

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 sebesar 1833,78%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	85	85	100%	Karena Belum ada Evaluasi/ Penilaian ditahun 2022
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	7,00	9,78	139,71%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,12	91,35	104,86%	Sangat Tinggi
Rata-rata						**1.834,96%**	**Sangat Tinggi**

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2022 diambil dari nilai atau capaian kinerja tahun 2021 dengan nilai 85 atau capaian kinerjanya senilai 100 % karena belum adanya evaluasi/ penilaian dari Tim evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (sumber data *Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP).* Target kinerja melebihi target, adapaun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu *planning* penganggaran yang kurang tepat sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran guna memenuhi target kinerja, dan dalam hal upaya untuk meningkatkan indikator kinerja ke – 1 (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dalam hal ini Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain penganggaran, pengendalian akuntansi, efektifitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2022 capaian kinerja realisasi investasi sebesar 9,78 Triliun Rupiah dngan pertmbuhan investasi sebesar 1,71% atau capaian kinerja sebesar 5300% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*). Target kinerja melebihi target, hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memprediksi dengan tepat kapan dampak *Pandemi Covid 19* terhadap perekonomian global akan berakhir, akan tetapi di Akhir triwulan IV pada Tahun 2021 pertumbuhan investasi menunjukan gejala yang mulai normal, sehingga investasi melonjak naik sekitar 36,22 %. Namun revisi target dalam RPJMD yang terkait dengan normalnya dampak ekonomi akibat krisis global tidak dapat dilakukan, karena perubahan pada RPJMD memiliki ketentuaan administrasi tersendiri. Dimana terjadi perubahan iklim investasi yang sangat cepat setelah

Pandemi Covid 19, yang juga dipicu oleh investasi Ibu Kota Negara (gencarnya pemerintah daerah melakukan promosi Kutai Kartanegara sebagai mitra IKN) dan kebutuhan investasi energi akibat krisis energi dunia (karena melonjaknya nilai investasi di kutai Kartanegara pada sektor SDA sampai dengan 86% (persen) sebagai pengungkit investasi) hal ini dilihat dari nilai Capaian Pertumbuhan Investasi yang diambil dari Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada 2 tahun terakhir ini menunjukan realisasi investasi ataupun pertumbuhan investasi melonjak sangat tinggi. (Data dukung dari Aplikasi NSWI (*National Single Window for Investment*)), dimana target investasi berada pada *range* 30% sampai dengan 50% atau sekitar 7 Triliun Rupiah sampai dengan 9 Triliun Rupiah. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya keadaran para pelaku usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan usahanya pada aplikasi LKPM dan juga masih banyaknya para pelaku usaha yang melakukan investasi tidak tercatat dan tidak melakukan pelaporan, dengan situasi tersebut DPMPTSP berusaha melakukan kegiatan pendampingan langsung ke lokasi usaha untuk membantu para pelau usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan usahanya, solusi/ rekomendasinya adalah untuk mendapatkan hasil realisasi dan capaian kinerja diharapkan dapat ditentukan perhitungan untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan target sebelumnya, disamping itu juga diharapkan kepada suluruh *stakeholder* yang berperan dalam peningkatan iklim investasi daerah dapat meningkatkan capaian investasi setiap tahunnya salah satunya dengan cara pengembangan inovasi dan kreativitas para pengusaha.

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3” tahun 2022 sebesar 87,12 dan realisasinya 91,35 atau capaian kinerja sebesar 104,86% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, yang mana Berdasarkan hasil analisis kinerja masing- masing indikator survei kepuasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kertanegara dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai rata-rata 3,86 sedangkan nilai yang terendah adalah kualitas sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata 3,50. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dalam mengambil kebijakan

terhadap faktor-faktor yang terdapat perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Untuk faktor -faktor yang terdapat perbedaan persepsi atas tingkat kinerja terdiri dari faktor- faktor (i) kompetensi/kemampuan petugas dan (ii) kualitas sarana dan prasarana. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa kebijakan dapat ditempuh, antara lain (i) meningkatkan kompetensi petugas pelaksana terhadap setiap jenis perijinan yang diberikan mulai dari landasan, mekanisme proses, persyaratan dan waktu yang diperlukan, (ii) melengkapi fasilitas ruang pelayanan perijinan dengan infrastruktur utama, seperti pendingin ruangan, ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas pendukung seperti kantin, dll. (iii) menyediakan ruang pengaduan untuk dapat mengakomodir pengaduan yang disampaikan secara langsung oleh pemohon. Solusi/ rekomendasinya adalah Melakukan kajian/ penelitian lebih mendalam terhadap setiap faktor yang kinerjanya kurang, untuk mendapatkan pemahaman permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, Pengambilan keputusan dalam kebijakan perbaikan kualitas pelayanan perijinan sebaiknya didasarkan pada hasil penelitian/ kajian.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 1833,78%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 118,76%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 1715,02%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai	80	82,02	102,50%	85	85	100,02%	Belum ada Penilaian AKIP ditahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
	Kinerja Pemerintah	(AKIP)								2022, maka yg diambil nilai realisasi 2021
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	3,20	3,76	117,50%	1,71	90,63	139,71%	Meningkat
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87	87,09	100,10%	87,12	91,35	104,86%	Meningkat
Rata-rata									**116,08%**	**Meningkat**

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2022)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
1	Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85	85	100%
2	Nilai Realisasi Investasi	7,00	9,78	139,71%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,12	91,35	104,86%

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian Realiasai Anggaran Program (%)	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,10	9,90	Efisiensi
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	139,71	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	97,08	1,23	Efisiensi
				Program Promosi Penanaman Modal			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,59	Program Pelayanan Penanaman Modal	96,19	3,81	Efisiensi
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 dengan target sebesar 85 dan realisasinya 85 atau capaian kinerja sebesar 100%, karena pada tahun 2022 belum ada evaluasi/ audit AKIP dari tim evaluasi tahun 2022. Adapaun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu *planning* penganggaran yang kurang tepat sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran guna memenuhi target kinerja, dan dalam hal upaya untuk meningkatkan indikator kinerja ke – 1 (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dalam hal ini Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: Penganggaran, pengendalian akuntansi, efektifitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman modal

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu Jumlah Proyek tahun 2022 dengan target kinerja program sebesar 625 Proyek dan realisasinya sebesar 641 Proyek atau capaian kinerja sebesar 102,56%. Target kinerja tercapai dan melebihi target hal ini dikarenakan telah terjadi perubahan iklim investasi yang sangat cepat setelah *Pandemi Covid 19*, yang juga dipicu oleh investasi Ibu Kota Negara (gencarnya pemerintah daerah melakukan promosi Kutai Kartanegara sebagai mitra IKN) dan kebutuhan investasi energi akibat krisis energi dunia (karena melonjaknya nilai investasi di kutai Kartanegara pada sektor SDA sampai dengan 86% (persen) sebagai pengungkit investasi) hal ini dilihat dari nilai Capaian Pertumbuhan Investasi yang diambil dari Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada 2 tahun terakhir ini menunjukan Lonjakan yang sangat

tinggi. (Data dukung dari Aplikasi NSWI (*National Single Window for Investment*)), dimana target investasi berada pada *range* 30% sampai dengan 50% atau sekitar 7 Triliun Rupiah sampai dengan 9 Triliun Rupiah. pada Indikator Kinerja ini didukung oleh 2 program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Hal pertama terkait dengan cara penanganan atau aparat hukum dalam menangani atau menyelesaikan proses hukum terkait tumpang tindih lahan investasi. Terkait dengan penanganan hukum tersebut memang harus melihat banyak aspek, tidak bisa dilihat dari satu atau dua aspek jadi masalah kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama dengan beberapa pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan berinvestasi, ataupun akses pembiayaan perbankan. Solusi/ rekomendasinya adalah Pemerintah Pusat maupun daerah Kabupaten/ kota harus memberikan Kepastian Hukum yang disebut *lack of certainty* sehingga investasi akan meningkat. Solusi/ rekomendasinya adalah Penambahan Realisasi Investasi atau Pertumbuhan Investasi pada tahun 2022 masih bersumber pada sektor pertambangan dan migas, sehingga perlu diarahkan pada sektor sumber daya alam terbarukan serta hilirisasi SDA, disamping itu juga diharapkan kepada suluruh *stakeholder* yang berperan dalam peningkatan iklim investasi daerah dapat berkolaborasi dan melakukan Debirokratisasi perizinan untuk memudahkan Penanaman Modal.

Tabel. 11
Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	% Realisasi Capaian Kinerja Program
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	625	641	102,63
			Program Promosi Penanaman Modal	200	537	268,50
			Program Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal	8,25	149,88	1810,14

Sumber Data : LKPM, Aplikasi NSWI, Koord. Penanaman Modal DPMPTSP

Gambar. 2
Pendampingan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

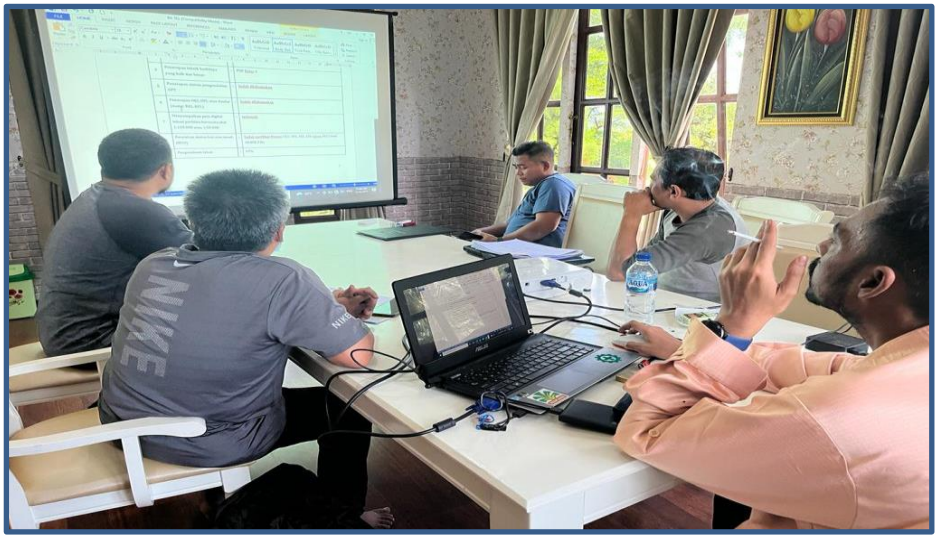

3) Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan target kinerja program sebesar 87,12 dan realisasinya sebesar 91,35 atau capaian kinerja sebesar 104,86%. Target kinerja tercapai dan melebihi target hal ini dikarenakan berdasarkan hasil analisis kinerja masing- masing indikator survei kepuasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kertanegara dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai rata-rata 3,86 sedangkan nilai yang terendah adalah kualitas sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata 3,50. Pada Indikator Kinerja ini didukung oleh 3 program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penananaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dalam mengambil kebijakan terhadap faktor-faktor yang terdapat perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Untuk faktor -faktor yang terdapat perbedaan persepsi atas tingkat kinerja terdiri dari faktor- faktor (i) kompetensi/ kemampuan petugas dan (ii) kualitas sarana dan

prasarana. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa kebijakan dapat ditemput, antara lain (i) meningkatkan kompetensi petugas pelaksana terhadap setiap jenis perijinan yang diberikan mulai dari landasan, mekanisme proses, persyaratan dan waktu yang diperlukan, (ii) melengkapi fasilitas ruang pelayanan perijinan dengan infrastruktur utama, seperti pendingin ruangan, ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas pendukung seperti kantin, dll. (iii) menyediakan ruang pengaduan untuk dapat mengakomodir pengaduan yang disampaikan secara langsung oleh pemohon. Solusi/ rekomendasinya adalah Melakukan kajian/ penelitian lebih mendalam terhadap setiap faktor yang kinerjanya kurang, untuk mendapatkan pemahaman permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, Pengambilan keputusan dalam kebijakan perbaikan kualitas pelayanan perijinan sebaiknya didasarkan pada hasil penelitian/ kajian.

Tabel. 12
Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	% Realisasi Capaian Kinerja Program
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	87,12	91,35	104,86
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3	15	500,00

Sumber Data: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, Koord. PTSP DPMPTSP

Grafik. 1
Saran- saran Perbaikan kualitas pelayanan DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara

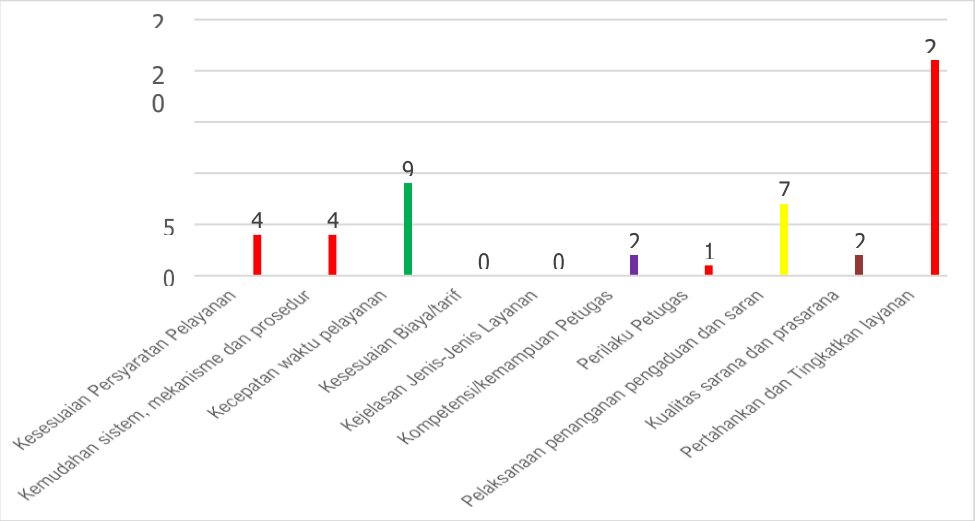

Tabel 13.
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	85	100	Berhasil
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	625	641	102,56	Berhasil
			Program Promosi Penanaman Modal	200	537	268,50	Berhasil
2			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	8,28	149,88	1810,14	Berhasil
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	87,12	91,35	104,86	Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Penanaman Modal dan PTSP		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3	15	500	Berrhasil

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/ kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 87,85%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
				(Rp)	(Rp)	(%)	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	14.183.258.420	12.779.302.506	90,10	1.403.955.914
1.1			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.600.000	135.600.000	99,27	1.000.000
1.2			Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.111.604.099	8.978.695.551	88,80	1.132.908.548
1.3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	26.999.000	26.838.600	99,41	160.400
1.4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.849.500	185.099.000	98,54	2.750.500
1.5			Administrasi Umum Perangkat	1.506.335.145	1.496.944.468	99,38	9.390.677

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Daerah				
1.6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.867.000	390.715.450	98,70	5.151.550
1.7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.495.153.676	1.244.029.897	83,20	251.123.779
1.8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	322.850.000	321.379.540	99,54	1.470.460
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi ((PMDN/ PMA))	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.200.000.000	1.185.285.899	98,77	14.714.101
2.1			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	350.000.000	340.518.356	97,29	9.481.644
2.2			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	850.000.000	844.767.543	99,38	5.232.457
3			Program Promosi Penanaman Modal	700.000.000,00	659.285.998	94,18	40.714.002
3.1			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	700.000.000,00	659.285.998	94,18	40.714.002

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.000.000.000	961.853.687,00	96,19	38.146.313
4.1			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.000.000.000	961.853.687	96,19	38.146.313
5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.298.133.000	1.055.166.427	81,28	242.966.573
5.1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/ Kota	1.298.133.000	1.055.166.427	81,28	242.966.573
6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	7.744.709.664	6.311.496.486	81,49	1.433.213.178
6.1			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah	7.744.709.664	6.311.496.486	81,49	1.433.213.178

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
				(Rp)	(Rp)	(%)	
			Kabupaten/ Kota				
Total				**26.126.101.084**	**22.952.391.003**	**87,85**	**3.173.710.081**

Dengan rincian sub kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 15.
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Tahun 2022

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
							(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
1	**Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**	**80,00**	**14.183.258.420**	**87,86**	**12.779.302.506**	**87,81**	**1.406.066.527**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**136.600.000**		**135.600.000**	99,44	**3.110.613**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	76.300.000	2 Dokumen	76.300.000	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		1 Dokumen	6.700.000	1 Dokumen	6.700.000	100	-
		Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD		1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	8.800.000	100	-
		Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD		1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	8.800.000	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Dokumen	36.000.000	6 Dokumen	35.000.000	97,22	1.000.000
		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			**10.111.604.099**		**8.978.695.551**	90,41	**1.132.908.548**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPTSP	91 Org	9.683.704.099	91 Org	8.657.060.551	89,40	1.026.643.548

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
							(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	19.400.000	1 Dokumen	19.400.000	100	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	110.200.000	5 Dokumen	110.075.000	99,89	125.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	285.000.000	3 Dokumen	178.860.000	62,76	106.140.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	13.300.000	1 Dokumen	13.300.000	100	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah			**26.999.000**		**26.838.600**	99,47	**160.400**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	14.999.000	1 Dokumen	14.838.600	98,93	160.400
		Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	100	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**187.849.500**		**185.099.000**	98,81	**2.750.500**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	55.044.000	15 Aparatur	54.754.000	99,47	290.000

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
							(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan	50 Aparatur	132.805.500	50 Aparatur	130.345.000	98,15	2.460.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.506.335.145**		**1.496.944.468**	98,82	**9.390.677**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	145.100.000	35 Unit	143.329.920	98,78	1.770.080
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik	25 Jenis	320.739.145	25 Jenis	320.374.000	99,89	365.145
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	22 Jenis	100.000.000	22 Jenis	99.798.580	99,80	201.420
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi	200 OK	726.196.000	200 OK	719.960.968	99,14	6.235.032
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan	500 Dokumen	200.000.000	500 Dokumen	199.841.000	99,92	159.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita	24 Berita	14.300.000	24 Berita	13.640.000	95,38	660.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**395.867.000**		**390.715.450**		**5.151.550**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Paket	395.867.000	4 Paket	390.715.450	98,70	5.151.550
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**1.495.153.676**		**1.244.029.897**	**92,14**	**251.123.779**

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
							(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Prangko	2500 Lembar	5.995.000	2500 Lembar	5.616.875	93,69	378.125
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Priode Pembayaran	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	113.094.378	94,25	6.905.622
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	50 Jenis	89.480.000	50 Jenis	89.149.970	99,63	330.030
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non ASN	49 Orang	1.279.678.676	49 Orang	1.036.168.674	80,97	243.510.002
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**322.850.000**		**321.379.540**	**99,27**	**1.470.460**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan	48 Unit	263.620.000	48 Unit	262.839.540	99,70	780.460
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	60 Unit	59.230.000	60 Unit	58.540.000	98,84	690.000
2	**Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi**	**1,71**	**1.200.000.000**	**90,63**	**1.185.285.899**	**98,34**	**14.714.101**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**350.000.000**		**340.518.356**	**97,29**	**9.481.644**

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
							(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	340.518.356	97,29	9.481.644
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			**850.000.000**		**844.767.543**	**99,39**	**5.232.457**
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	348.067.543	99,45	1.932.457
		Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	496.700.000	99,34	3.300.000
		Program Promosi Penanaman Modal			**700.000.000**		**659.285.998**		**40.714.002**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**700.000.000**		**659.285.998**	**92,60**	**40.714.002**
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	177.776.500	88,89	22.223.500
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah,luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	4 Event	500.000.000	4 Event	481.509.498	96,30	18.490.502
		Program Pelayanan Penanaman Modal			**1.000.000.000**		**961.853.687**		**38.146.313**

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
							(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**1.000.000.000**		**961.853.687**	**96,60**	**38.146.313**
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		500 Pemohon	300.000.000	500 Pemohon	267.750.687	89,25	32.249.313
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		500 izin	300.000.000	500 Izin	299.330.000	99,78	670.000
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		500 Pelaku Usaha	200.000.000	500 Pelaku Usaha	194.773.000	97,39	5.227.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		500 Izin	200.000.000	500 Izin	200.000.000	100	-
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			**1.298.133.000**		**1.055.166.427**		**242.966.573**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota			**1.298.133.000**		**1.055.166.427**	**87,37**	**242.966.573**

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
							(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		50/ 200 Perusahaan/ UMKM	200.000.000	50 / 200 Perusahaan/ UMKM	200.000.000	100	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		50/ 400 Perusahaan/ UMKM	418.133.000	50 / 400 Perusahaan/ UMKM	394.713.429	94,40	23.419.571
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		50/ 200 Perusahaan/ UMKM	680.000.000	50 / 200 Perusahaan/ UMKM	460.452.998	67,71	219.547.002
3	**Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**87,12**	**7.744.709.664**	**91,35**	**6.311.496.486**		**1.433.213.178**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah			**7.744.709.664**		**6.311.496.486**		**1.433.213.178**
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Aplikasi	7.744.709.664	1 Aplikasi	6.311.496.486	81,49	1.433.213.178
Total					**26.126.101.084**	**100**	**22.952.391.003**	**87,85**	**3.173.710.081**

BerAKHLAK

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi angggaran sebesar 87,51%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 16.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.206.685.640	13.352.828.599	87,81	1.853.857.041
1.1			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	353.116.520	350.005.907	99,12	3.110.613
1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.272.399.916	10.706.194.991	87,24	1.566.204.925
1.3			Administrasi Barang milik daerah Pada perangkat Daerah	54.998.800	52.306.266	95,10	2.692.534
1.4			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	250.000.000	186.306.000	74,52	63.694.000
1.5			Administrasi umum perangkat daerah	1.336.327.440	1.257.918.784	94,13	78.408.656
1.6			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.051.692	237.650.000	81,09	55.401.692
1.7			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	323.941.272	245.404.291	75,76	78.536.981
1.8			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	322.850.000	317.042.360	98,20	5.807.640
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi ((PMDN/ PMA))	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	76.758.800	75.977.432	98,98	**781.368**
2.1			Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/ Kota	76.758.800	75.977.432	98,98	**781.368**
3			Program Promosi Penanaman Modal	671.632.953	647.449.900	96,40	**24.183.053**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
3.1			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/ kota	671.632.953	647.449.900	96,40	**24.183.053**
4			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	635.173.000	385.784.400	60,74	**249.388.600**
4.1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	635.173.000	385.784.400	60,74	**249.388.600**
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	349.788.000	341.889.000	97,74	**7.899.000**
5.1			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	349.788.000	341.889.000	97,74	**7.899.000**
6			Program Pengeloaan Data dan Sistem Infornasi Penanaman Modal	283.488.545	267.635.100	94,41	**15.853.445**
6.1			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	283.488.545	267.635.100	94,41	**15.853.445**
Total				**17.223.526.938**	**15.071.564.431**	**87,51**	**2.151.962.507**

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi angggaran sebesar 80,20%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 17
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (Tahun 2021)

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**	**80,00**	**16.089.003.575,00**	**15.206.685.640,00**	**87,86**	**13.352.828.599,00**	**87,81**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**383.466.520,00**	**353.116.520,00**		**350.005.907,00**	99,12	**3.110.613,00**
1		Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	57.440.000,00	57.440.000,00	2 Dokumen	57.440.000,00	100	-
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	24.219.800,00	24.219.800,00	1 Dokumen	24.219.800,00	100	-
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19.220.000,00	19.220.000,00	1 Dokumen	19.220.000,00	100	-
4		Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	19.220.000,00	19.220.000,00	1 Dokumen	19.220.000,00	100	-

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
									(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
5		Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	19.220.000,00	19.220.000,00	1	Dokumen	19.220.000,00	100	-
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6 Dokumen	244.146.720,00	213.796.720,00	6	Dokumen	210.686.107,00	98,55	3.110.613,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**12.940.850.453,00**	**12.272.399.916,00**			**10.706.194.991,00**	87,24	**1.566.204.925,00**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPTSP	91 Orang	11.655.748.889,00	10.987.298.352,00	91	Orang	9.480.579.648	86,29	1.506.718.704,00
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pendukung Non ASN	46 Orang	983.568.764,00	983.568.764,00	46	Orang	943.338.393	95,91	40.230.371,00
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	63.440.000,00	63.440.000,00	1	Dokumen	63.440.000,00	100	-
4		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	18.439.800,00	18.439.800,00	5	Dokumen	17.939.600,00	97,29	500.200,00

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	191.213.000,00	191.213.000,00	3 Dokumen	172.957.950,00	90,45	18.255.050,00
6		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	28.440.000,00	28.440.000,00	1 Dokumen	27.939.400,00	98,24	500.600,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**54.998.800,00**	**54.998.800,00**		**52.306.266,00**	95,1	**2.692.534,00**
1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	14.999.000,00	14.999.000,00	1 Dok	13.984.266,00	93,23	1.014.734,00
2		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	39.999.800,00	39.999.800,00	2 Dok	38.322.000,00	95,81	1.677.800,00
		Administrasi Kepegawaian			**350.000.000,00**	**250.000.000,00**		**186.306.000,00**	74,52	**63.694.000,00**

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
									(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
		Perangkat Daerah									
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	100.000.000,00	-	0	Aparatur	-	-	-
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan	50 Aparatur	250.000.000,00	250.000.000,00	50	Aparatur	186.306.000,00	74,52	63.694.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.336.327.440,00**	**1.336.327.440,00**			**1.257.918.784,00**	94,13	**78.408.656,00**
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	151.460.000,00	151.460.000,00	35	Unit	146.615.400,00	96,8	4.844.600,00
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik	25 Jenis	14.997.000,00	14.997.000,00	25	Jenis	14.997.000,00	100	-
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	22 Jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	22	Jenis	99.750.000,00	99,75	250.000,00
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buah/ Eksemplar	500 Eksemplar	45.000.000,00	45.000.000,00	500	Eksemplar	29.356.000,00	65,24	15.644.000,00

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
									(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi/ Konsultasi	200 OK	749.978.000,00	749.978.000,00	200	OK	736.690.984,00	98,23	13.287.016,00
6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan	500 Dokumen	203.952.400,00	203.952.400,00	500	Dokumen	159.669.600,00	78,29	44.282.800,00
7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/ Berita	24 Berita	70.940.040,00	70.940.040,00	24	Berita	70.839.800,00	99,86	100.240,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**360.081.810,00**	**293.051.692,00**			**237.650.000,00**	81,09	**55.401.692,00**
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 Paket	360.081.810,00	293.051.692,00	5	Paket	237.650.000,00	81,09	55.401.692,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**340.428.552,00**	**323.941.272,00**			**245.404.291,00**	75,76	**78.536.981,00**

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
									(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7		8		9 = (6-8)
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/ Prangko	2500 Lembar	5.995.000,00	5.995.000,00	2500	Lembar	5.450.000,00	90,91	545.000,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Priode Pembayaran	12 Bulan	184.953.552,00	168.466.272,00	12	Bulan	96.657.791,00	57,38	71.808.481,00
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	50 Jenis	149.480.000,00	149.480.000,00	50	Jenis	143.296.500,00	95,86	6.183.500,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**322.850.000,00**	**322.850.000,00**			**317.042.360,00**	98,2	**5.807.640,00**
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan	48 Unit	263.620.000,00	263.620.000,00	48	Unit	257.812.360,00	97,8	5.807.640,00
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	60 Unit	59.230.000,00	59.230.000,00	60	Unit	59.230.000,00	100	-
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	**Program Pengembangan Iklim Penanaman**	**Jumlah/ Target Penanaman Modal (PMDN/ PMA)**	**3.236**	**99.999.800,00**	**76.758.800,00**	**3.843**		**75.977.432,00**	98,98	**781.368,00**

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
	(PMDN/ PMA)	**Modal**	**(Triliun Rupiah)**							
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			99.999.800,00	76.758.800,00		75.977.432,00		781.368,00
1		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	99.999.800,00	76.758.800,00	1 Dokumen	75.977.432,00	98,98	781.368,00
		Program Promosi Penananam Modal			**700.000.000,00**	**671.632.953,00**		**647.449.900,00**	96,4	**24.183.053,00**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000,00	671.632.953,00		647.449.900,00		24.183.053,00
1		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	3 Event	700.000.000,00	671.632.953,00	3 Event	647.449.900,00	96,4	24.183.053,00
		Program Pelayanan Penanaman			**399.788.000,00**	**349.788.000,00**		**341.889.000,00**	**97,74**	**7.899.000,00**

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
		Modal								
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			399.788.000,00	349.788.000,00		341.889.000,00	97,74	7.899.000,00
1		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	100.000.000,00	50.000.000,00	40 Izin	43.871.000,00	87,74	6.129.000,00
2		Pemantauan Pemenuhuan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	100.000.000,00	100.000.000,00	40 Izin	98.704.000,00	98,7	1.296.000,00

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
3		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	99.788.000,00	99.788.000,00	40 Izin	99.788.000,00	100	-
4		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	100.000.000,00	100.000.000,00	40 Izin	99.526.000,00	99,53	474.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			**635.173.000,00**	**635.173.000,00**		**385.784.400,00**	60,74	**249.388.600,00**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/ Kota			635.173.000,00	635.173.000,00		385.784.400,00	60,74	249.388.600,00

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	20 Perusahaan	100.000.000,00	102.766.000,00	20 Perusahaan	97.847.100,00	95,21	4.918.900,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah Perusahaan yang dipantau	20 Perusahaan	110.000.000,00	107.234.000,00	14 Perusahaan	48.849.200,00	45,55	58.384.800,00
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dibina	20 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	20 Perusahaan	94.650.000	94,65	5.350.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah Perusahaan yang dibina	20 Perusahaan	110.000.000,00	110.000.000,00	20 Perusahaan	36.240.000,00	32,95	73.760.000,00

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	20 Perusahaan	41.225.500,00	41,23	58.774.500,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	115.173.000,00	115.173.000,00	23 Perusahaan	66.972.600,00	58,15	48.200.400,00
	Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Skore Indeks Kepuasan Masyarakat**	**87,00**	**341.904.000,00**	**283.488.545,00**	**87,09**	**267.635.100,00**	94,41	**15.853.445,00**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah			341.904.000,00	283.488.545,00		267.635.100,00	94,41	15.853.445,00

BerAKHLAK

No	Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu
								(Rp.)	(%)	
1		2	3	4	5	6	7	8		9 = (6-8)
1		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	69 Dokumen	341.904.000,00	283.488.545,00	69 Dok	267.635.100		15.853.445,00
		Jumlah			**18.265.868.375,00**	**17.223.526.938,00**	**100**	**15.071.564.431,00**	**80,20**	**2.151.962.507,00**

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 0,34% antara realisasi anggaran tahun 2021 ke tahun 2022.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal 1.834,95% dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 rata-rata sebesar (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

1) Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Ke- I "Nillai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)" sebesar 100% (Tinggi), dikarenakan pada tahun 2022 DPMPTSP tidak adanya Evaluasi SAKIP dari tim audit/ tim evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2022 pada Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
2) Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ke- 2 "Nilai Realisasi Investasi" sebesar 139,71%. (Sangat Tinggi). Target kinerja melebihi target, hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memprediksi dengan tepat kapan dampak *Pandemi Covid 19* terhadap perekonomian global akan berakhir, akan tetapi di Akhir triwulan IV pada Tahun 2021 pertumbuhan investasi menunjukan gejala yang mulai normal, sehingga investasi melonjak naik sekitar 36,22 %. Namun revisi target dalam RPJMD yang terkait dengan normalnya dampak ekonomi akibat krisis global tidak dapat dilakukan, karena perubahan pada RPJMD memiliki ketentuaan administrasi tersendiri. Dimana terjadi perubahan iklim investasi yang sangat cepat setelah *Pandemi Covid 19*, yang juga dipicu oleh investasi Ibu Kota Negara (gencarnya pemerintah daerah melakukan promosi Kutai Kartanegara sebagai mitra IKN) dan kebutuhan investasi energi akibat krisis energi dunia (karena melonjaknya nilai investasi di kutai Kartanegara pada sektor SDA sampai dengan 86% (persen) sebagai pengungkit investasi) hal ini dilihat dari nilai Capaian Pertumbuhan Investasi yang diambil dari Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada 2 tahun terakhir ini menunjukan realisasi investasi ataupun pertumbuhan investasi melonjak sangat tinggi. (Data dukung dari Aplikasi NSWI (*National Single Window for Investment*)), dimana target investasi berada pada *range* 30% sampai dengan 50% atau sekitar 7 Triliun Rupiah sampai dengan 9 Triliun Rupiah. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya keadaran para pelaku usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan usahanya pada aplikasi LKPM dan juga masih banyaknya para pelaku usaha yang melakukan investasi tidak tercatat dan tidak melakukan pelaporan, dengan situasi tersebut DPMPTSP berusaha

melakukan kegiatan pendampingan langsung ke lokasi usaha untuk membantu para pelau usaha dalam melakukan pelaporan kegiatan usahanya, solusi/ rekomendasinya adalah untuk mendapatkan hasil realisasi dan capaian kinerja diharapkan dapat ditentukan perhitungan untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan target sebelumnya, disamping itu juga diharapkan kepada suluruh *stakeholder* yang berperan dalam peningkatan iklim investasi daerah dapat meningkatkan capaian investasi setiap tahunnya salah satunya dengan cara pengembangan inovasi dan kreativitas para pengusaha.

3) Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Ke- 3 “Indeks Kepuasan Konsumen” sebesar 104,86% (Sangat Tinggi) hal ini berdasarkan hasil analisis kinerja masing-masing indikator survei kepuasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kertanegara dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai rata-rata 3,86 sedangkan nilai yang terendah adalah kualitas sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata 3,50. Pada Indikator Kinerja ini didukung oleh 3 program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penananaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dalam mengambil kebijakan terhadap faktor-faktor yang terdapat perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Untuk faktor -faktor yang terdapat perbedaan persepsi atas tingkat kinerja terdiri dari faktor- faktor (i) kompetensi/kemampuan petugas dan (ii) kualitas sarana dan prasarana. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi antara pemohon dengan petugas pelaksana DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa kebijakan dapat ditemput, antara lain (i) meningkatkan kompetensi petugas pelaksana terhadap setiap jenis perijinan yang diberikan mulai dari landasan, mekanisme proses, persyaratan dan waktu yang diperlukan, (ii) melengkapi fasilitas ruang pelayanan perijinan dengan infrastruktur utama, seperti pendingin ruangan, ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas pendukung seperti kantin, dll. (iii) menyediakan ruang pengaduan untuk dapat mengakomodir pengaduan yang disampaikan secara langsung oleh pemohon. Solusi/ rekomendasinya adalah Melakukan kajian/ penelitian lebih mendalam terhadap setiap faktor yang kinerjanya kurang, untuk mendapatkan pemahaman permasalahan apa yang sebenarnya terjadi,

Pengambilan keputusan dalam kebijakan perbaikan kualitas pelayanan perijinan sebaiknya didasarkan pada hasil penelitian/ kajian.

Capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 1834,96% dan pada tahun sebelumnya (Tahun 2021) capaian kinerjanya sebesar 107,42% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 1727,54%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan penggunaan Ilmu Teknologi (IT);
3) Pengendalian Penanaman Modal menuju Hilirisasi Sumber Daya Alam;
4) Membuat tindak lanjut Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal dalam bentuk Peraturan Bupati (PERBUP)/ Peraturan Kepala Daerah (PERKADA);
5) Membuat kajian Investasi untuk menarik minat Penanaman Modal terutama pada bidang yang diunggulkan pada RPJMD yaitu Pertanian dalam arti luas, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 1 Maret 2023
Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Kartanegra,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. H. Bambang Arwanto, AP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740111 199311 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI GEDUNG D LANTAI DASAR
JL. WOLTER MONGINSIDI KEL. TIMBAU
TENGGARONG